

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Hakikat Komunikasi Politik

Membicarakan komunikasi politik tidak semudah dengan membicarakan gerakan politik. Kesulitan itu muncul karena ada dua konsep yang mengusung disiplin ilmu ini, yakni konsep “komunikasi” dan “politik”. Komunikasi politik adalah sebuah studi yang interdisipliner yang dibangun atas berbagai macam ilmu, terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik. Ia merupakan wilayah pertarungan dan dimeriahkan oleh persaingan teori, pendekatan, agenda dan konsep dalam membangun jati diri.²³

Apa yang dimaksud dengan komunikasi politik? Bertolak dari konsep komunikasi dan konsep politik yang telah diuraikan pada bagian awal, upaya untuk mendekati pengertian apa yang dimaksud komunikasi politik, pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta

²³ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2009), hlm 16.

mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.²⁴

Michael Rush dan Philip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pola pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.²⁵

Komunikasi politik merupakan suatu elemen yang dinamis dan yang menentukan sosialisasi politik dan partisipasi politik. Dalam hal ini komunikasi politik menentukan corak perilaku insan politik.²⁶

Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi anatar “yang memerintah” dan “yang diperintah”²⁷

Komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satupun manusia tiak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awan

²⁴ *Ibid*, hlm.35

²⁵ Michael Rush & Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 24

²⁶ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi....*, hlm. 159

²⁷ Michael Rush & Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi....*, hlm. 22

berkomentar soal kenaikan BBM, korupsi, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik.

Komunikasi yang membicarakan tentang politik kadang diklaim sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik, dan sering dikaitkan sebagai komunikasi kampanye pemilu (*election campaign*) karena mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antarkandidat, dan penggunaan media massa sebagai alat kampanye.

Komunikasi dan politik memiliki hubungan yang erat dan istimewa karena berada dalam kawasan politik dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang fundamental. Komunikasi politik menyambungkan semua bagian dari sistem politik sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan.

2. Unsur Komunikasi Politik

Seperti halnya dengan disiplin komunikasi lainnya, komunikasi politik sebagai *body of knowledge* juga terdiri atas berbagai unsur, yakni:

a. Komunikator Politik

Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, sumber atau komunikator politik adalah mereka-mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, MPR, KPU, gubernur, bupati/walikota, DPRD, politisi, fungsionaris partai politik, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok-

kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa memengaruhi jalannya pemerintahan.

b. Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita surat kabar, radio, televisi, dan internet yang berisi ulasan politik dan pemerintahan.

c. Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, yaitu surat kabar, tabloid, majalah, buku. Media elektronik, misalnya film, radio, televisi, video, komputer, internet. Media format kecil, misalnya leaflet, brosur, selebaran, stiker, bulletin. Media luar ruangan (*out door media*), misalnya baliho, spanduk, reklame, *electronic board*, bendera, jumbai, pin, logo, topi, rompi, kaos oblong, iklan mobil, kalender, kulit buku, block note, pulpoen, gantungan kunci dan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membangun citra.

d. Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (*vote*) kepada partai atau

kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, ibu rumah tangga, pensiunan, veteran, pedagang kaki lima, para tukang (kayu, batu, cukur, becak) orang cacat, mahasiswa, sopir angkutan, nelayan, dan siswa yang akan memilih setelah cukup usia.

e. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, dimana masyarakat akan bermuara pada pemberian suara (*vote*) dalam pemilihan umum. Pemberian suara ini sangat menentukan terpilihnya tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai tingkat presiden dan wakil presiden, anggota DPR, MPR, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota sampai pada tingkat DPRD.²⁸

3. Komunikasi Sebagai Proses Politik

Gabriel Almond mengatakan bahwa komunikasi ibarat aliran darah yang mengalirkan pesan politik berupa tuntutan, protes dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik. Dan hasil pemrosesan itu dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi *feedback* sistem politik.²⁹ Kita melihat bahwa sebuah realitas, sejarah, tradisi politik akan bisa dirangkaikan atau dihubungkan dari masa lalu untuk dijadikan acuan ke masa depan adalah dengan jalan komunikasi. Dengan komunikasi sebagai proses politik, berbagai tatanan

²⁸ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik...*, hlm 37-39.

²⁹ Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 55

politik yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat akan berubah. Misalnya tradisionalisme, berbagai adopsi tradisi luar juga tidak akan mudah diterima begitu saja oleh masyarakat dan suatu dan suatu saat akan mengalami kegagalan seandainya bertentangan dengan tradisi yang sudah ada. Ada beberapa catatan yang bisa ditarik ketika kita memperbincangkan komunikasi sebagai proses politik.³⁰ *Pertama*, komunikasi memiliki peran signifikan dalam menentukan proses perubahan politik di Indonesia. Ini bisa dilihat pada perubahan format lembaga kepresidenan yang dahulunya sakral kemudian mengalami desakralisasi. Itu semua diakibatkan oleh terbinanya komunikasi politik yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah. *Kedua*, kita pernah mewarisi komunikasi politik yang tertutup (yang mengakibatkan ideologi politik yang tidak terbuka), penafsiran ada pada pihak penguasa (mendominasi dan mengontrol semua bagian) sehingga memunculkan hegemoni komunikasi dan pola komunikasi *top down* (yang memunculkan sikap indoktrinatif).

Ketiga, komunikasi masih dipengaruhi oleh tradisi politik masa lalu. Tradisi politik yang mementingkan keseimbangan, harmoni, dan keserasian masih diwujudkan meskipun dalam kenyataan kadang justru tradisi itu dijadikan alat legitimasi politik penguasa atas nama stabilitas. Keterpengaruhannya ini juga termanifestasikan pada budaya sungkan atau ewuh pakewuh yang masih kental dalam tradisi komunikasi kita. *Keempat*, sebagai proses politik, komunikasi menjadi alat yang mampu mengalirkan

³⁰ *Ibid*, hlm. 66-67.

pesan politik (tuntutan dan dukungan) ke pusat kekuasaan untuk diproses. Proses itu kemudian dikeluarkan kembali dan selanjutnya menjadi umpan balik(*feedback*). Ini artinya, komunikasi sebagai proses politik adalah aktivitas tanpa henti. Sebagai contoh, di Indonesia bentuk proses terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dialirkan menjadi pesan lewat DPR ke pusat kekuasaan (pemerintah) untuk diproses. Kemudian hasilnya dikembalikan menjadi umpan balik dengan munculnya keputusan pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak.

4. Obyek Kajian Komunikasi Politik

Dalam kajian komunikasi politik sikap perilaku penguasa (elit berkuasa, elit partai) merupakan pokok bahasan atau obyek kajian utama, karena sikap perilaku penguasa merupakan warna dominan dan tolak ukur untuk menentukan dalam sistem politik apa proses komunikasi berlangsung. Sikap perilaku penguasa memberi dampak cukup berarti terhadap transformasi pesan-pesan komunikasi baik yang berada dalam struktur formal maupun yang berkembang dalam masyarakat.

a. Teori Tipe.

Teori ini dingkapkan oleh Dan Nimmo yang mengklasifikasikan orang ke dalam kategori-kategori berdasarkan karakteristik yang dominan atau tema pokok yang timbul berulang kali dalam perilaku mereka. Meskipun kebanyakan upaya untuk menguraikan kepribadian politik yang telah menerapkan teori tipe berfokus pada karakter dan gaya

pemimpin politik.³¹ Di sini perhatian kita adalah mereka yang telah menggunakan *theory type* (teori tipe) untuk memperhitungkan bagaimana khalayak komunikasi politik menanggapi dengan berbagai cara. Contoh yang sangat baik dari analisis demikian menelaah perbedaan-perbedaan dalam kepribadian berbagai kelompok:

1). Golongan inaktif adalah masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam organisasi politik atau sosial di daerahnya, mereka sama-sama memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam organisasi politik. Orang terdekat mereka mengkhawatirkan karena tokoh politik banyak yang dipenjara, sambil memaksakan ketaatan, konformitas, dan solidaritas orang terdekat (orang yang jadi panutan).

2). Golongan konstruksi bekerja pada proyek pelayanan sosial, tetapi jarang menjadi peserta protes yang terorganisasi; pemimpin mereka menekankan disiplin, prestasi, dan keandalan, pengungkapan diri yang terbatas, dan tipe orang semacam ini, lebih fokus pada pekerjaannya.

3). Golongan aktivis mengajukan protes atas kekecewaan mereka terhadap para pemimpin yang dinilai mempunyai prestasi buruk dan juga turut dalam memperbaiki citra tersebut, mereka lebih peka, independent dan bertanggung jawab.

4). Golongan pengingkar (disenter) adalah masyarakat yang hanya terlibat dalam protes-protes terorganisasi. Masyarakat semacam ini tidak

³¹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik...*, hlm. 108.

konsisten dalam melaksanakan kepribadian politik, karena serba membolehkan (permisif) hal-hal yang menurutnya benar (menguntungkan pribadi) dalam bidang lain tipe masyarakat seperti ini kurang bisa menempatkan posisi dan kedewasaan yang dini dibandingkan dengan masyarakat yang mempunyai kepribadian yang unggul. Contoh sifat kepribadian seperti ini menjadi virus yang berpotensi merusak lingkungan atau kelompok masyarakat.

Kebaikan atau kekurangan seperti contoh di atas bukan pokok masalah, melainkan hanya contoh tentang bagaimana masyarakat mencoba menerangkan politik sebagai refleksi kepribadian. Oleh karena itu, pandangan teori tipe bukan menunjukkan kecenderungan yang menentukan perilaku, melainkan berfokus pada konfigurasi perilaku yang memisahkan orang terhadap satu sama lain.

Partisipasi politik merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh setiap negara, karena partisipasi politik berkaitan erat dengan kelangsungan suatu negara. Partisipasi politik merupakan tolak ukur dalam memahami kualitas warga negara pada tingkat rujukan (referensi) pandangan dan tanggung jawab atas kemajuan dan kelangsungan hidup masyarakat atau mengetahui sistem politik apa yang mendasari berlangsungnya partisipasi tersebut dari sifat ataupun orientasi politiknya. Adapun bentuk partisipasi politik di sini terdapat aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Pengertian partisipasi politik

Robert P. Clark seorang guru besar pada Universitas George Mason, mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik dalam bukunya “*Power and Policy in The Third World*” yang menyatakan bahwa perkataan “partisipasipolitik” dapat diartikan berbeda-beda bergantung kepada kultur politik (budaya politik) yang melandasi kegiatan partisipasi tersebut.³²

Partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. Partisipasi politik berbeda-beda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Kadar partisipasi politik pun bervariasi.³³

Partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*publik live*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).³⁴

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson membuat batasan partisipasi politik sebagai “kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi

³² Rochayat Harun, Sumarno, *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 130.

³³ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi...*, hlm.147.

³⁴ Damsar, *Pengantar Sosiologi...*, hlm. 179.

pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif”.³⁵

Dari pengertian di atas memberi informasi bahwa partisipasi politik lebih diutamakan kepada aktivitas masyarakat (warga negara) di dalam turut memikirkan kehidupan negara. Partisipasi politik merupakan cerminan dari sikap politik warga negara atau masyarakat yang berwujud dalam perilaku baik secara psikis maupun secara fisik.

Menurut Milbrath menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. *Pertama*, karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. *Kedua*, karena faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.

Ketiga, karakter sosial seseorang yang meliputi status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. *Keempat*, faktor situasi atau lingkungan

³⁵ *Ibid*, hlm. 180.

politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.³⁶

Perilaku politik yang berkrystal dalam wujud partisipasi politik dalam berlangsung secara konvensional sebagai mana suatu keharusan yang berada dalam setiap sistem. Partisipasi yang berlangsung bersifat legal dan berada dalam ikatan normatif. Partisipasi politik yang tumbuh atas kesadaran sebagai partisipasi murni tanpa adanya paksaan.

Istilah partisipasi seringkali digunakan untuk memberi kesan mengambil bagian dalam sebuah aktivitas. Mengambil bagian dalam sebuah aktivitas dapat mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut.

Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan pemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.³⁷

Menurut Keith Davis ada tiga unsur penting partisipasi politik, meliputi: Unsur *pertama*, bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.

³⁶ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi...*, hlm 156-157.

³⁷ A.A Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), hlm. 90.

Unsur *kedua*, adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Unsur *ketiga*, adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Hal ini diakui sebagai anggota artinya ada rasa “sense of belongingness”.³⁸

2) Dimensi partisipasi politik

Individu atau kelompok mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara itu dibagi dalam tiga dimensi: gaya umum partisipasi, motif yang mendasari kegiatan mereka, dan konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik.³⁹

1. Gaya partisipasi

Mengacu kepada baik apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukannya; sebagaimana gaya pembicaraan politik (seperti antara singkat dan bertele-tele).

- Langsung

Ada orang yang melibatkan diri sendiri (actual) dengan hubungan yang dilakukan terus-menerus dengan figure politik.

- Sistematis

Beberapa individu berpartisipasi dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu, mereka bertindak bukan karena dorongan hati,

³⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi>, diakses pukul 14.15 tanggal 11 Desember 2013

³⁹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik...*, hlm. 145.

melainkan berdasarkan perhitungan, pikiran, perasaan untuk melakukan sesuatu bersifat konsisten.

2. Motif

Berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Salah satu perangkat faktor seperti ini menyangkut motif orang yang membuatnya ambil bagian. Motif-motif ini, seperti gaya partisipasi yang diberikan berbeda-beda dalam beberapa hal.

- Sengaja

Beberapa warga negara (masyarakat) mencari informasi dan peristiwa politik untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka bisa menjadi berpengetahuan, mengarahkan kebijaksanaan pejabat pemerintah.

- Rasional

Masyarakat yang berhasrat mencapai tujuan tertentu, yang dengan teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian memilih yang paling menguntungkan dipandang dari segi pengorbanan dan hasilnya atau disebut bermotivasi rasional.

3. Konsekuensi

Pembahasan mengenai segi partisipasi politik yang dipikirkan dan interpretatif dibandingkan dengan jenis yang kurang dipikirkan dan lebih tanpa disadari menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang politik pada umumnya.

Jika partisipasi politik seseorang membantu meneruskan situasi, program, pemerintah, atau keadaan yang berlaku, maka konsekuensinya sinambung.

3) Bentuk-bentuk partisipasi politik

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara.⁴⁰

Sastroatmodjo juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat terwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu.⁴¹

Sementara itu Maribath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori:

- Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- Spektator, adalah orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.

⁴⁰ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi...*, hlm.148.

⁴¹ Sudijono Sastroatmodjo, *Partisipasi Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 77.

- Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik, misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
- Pangkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.⁴²

Menurut Rahman kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.⁴³

Bentuk-bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh Almond yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional meliputi pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Bentuk partisipasi politik non konvensional meliputi pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan

⁴² A. Rahman H, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 289.

⁴³ *Ibid*, hlm. 287.

politik harta benda (pengrusakan, pengeboman), tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan).⁴⁴

b. Bentuk-Bentuk Komunikasi

Bagi David Easton, sistem politik tak lain dari bentuk interaksi yang diabstraksikan dari totalitas kelakuan sosial, dimana nilai-nilai autoritatif (berwenang) dialokasikan kepada masyarakat. Interaksi antara struktur politik dalam suatu sistem politik itu dapat dilihat sebagai unsur-unsur dari sistem komunikasi politik.

Hal menarik dari hubungan antara nilai-nilai autoritatif (berwenang) dan komunikasi politik adalah dalam implementasinya berupa bentuk-bentuk komunikasi politik. Ada dua bentuk komunikasi politik, yaitu: pertama, komunikasi politik yang cenderung mengambil posisi horizontal. Dalam komunikasi ini, posisi antara komunikator dan komunikan (masyarakat) relatif seimbang (saling memberi dan menerima), sehingga terjadi sharing. Bentuk komunikasi semacam ini merefleksikan nilai-nilai demokratis. Kedua, komunikasi politik yang cenderung membentuk pola-pola linier. Arus komunikasi (informasinya) satu arah, cenderung vertikal (*top down*). Bentuk komunikasi semacam ini merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistik dan pola kepemimpinan otoriter.

Adanya sistem hierarkis dalam struktur sosial, baik makro atau mikro, menyebabkan kesenjangan dalam pembagian tugas, wewenang

⁴⁴ Syarbaini, Syahrial, dkk, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 70-71.

dan tanggung jawab. Pada gilirannya, sistem hierarkis ini juga mengakibatkan terhambatnya proses komunikasi. Di satu pihak, ada orang-orang tertentu yang memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ide-ide bahkan menentukan pengambilan keputusan, karena suara atau gagasan tidak menentukan hasil konsensus. Secara psikologis politik, pola komunikasi yang demikian mendorong orang untuk bersikap apatis (masa bodoh) dan pada puncaknya menyebabkan berkurangnya partisipasi politik formal, dan merebaknya aktivitas politik “bawah tanah” (ilegal).

Ditinjau dari sudut perubahan sosial (*Social Change*), komunikasi semacam itu jelas sangat merugikan institusi sosial. Pertama, berkurangnya partisipasi dan dukungan anggota. Kedua, tidak terbentuknya etos kerja yang diwarnai oleh semangat kreatif, inovatif dan inisiatif, dan sebaliknya, cenderung membentuk mental “menunggu restu”. Ketiga, tidak adanya kontrol dari bawah, sehingga bila terjadi penyimpangan atas sistem, maka sukar untuk “diobati”. Keempat, menyebabkan tidak adanya ledakan spektakuler dari bakat-bakat yang tersembunyi pada diri individu. Kelima, secara institusional, problem solving (pemecahan masalah) menjadi kurang efektif, karena tidak adanya dialog antar anggota komunitas.

Konsekuensinya, bahwa dalam sistem politik komunikan (masyarakat) cenderung kurang terlibat dalam proses pembentukan keputusan, bahkan tidak dilibatkan. Itulah sebabnya, banyak output

sistem politik yang tidak sesuai dengan asosiasi masyarakat, dan setelah dijabarkan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan menimbulkan umpan balik (*feedback*) yang negatif (dalam bentuk reaksi yang keras).

5. Saluran-Saluran Komunikasi Politik

Istilah struktur komunikasi oleh Almond dan Powell (1966), juga diartikan sebagai saluran komunikasi, diantara adalah:

- a. Struktur wawamuka (*face-to-face*) informal, yaitu merupakan saluran yang efektif dalam penyampaian pesan-pesan politik. Di samping struktur yang formal dalam sebuah organisasi, selalu terdapat struktur informal yang “membayangi”nya. Saluran ini bersifat bebas dalam arti tidak terikat oleh struktur formal, namun tidak semua orang dapat akses ke saluran ini dalam kadar yang sama.
- b. Struktur sosial tradisional, yaitu sebuah saluran komunikasi yang ditentukan oleh posisi sosial pihak yang berkomunikasi (khalayak atau sumber). Artinya, pada lapis mana yang bersangkutan berkedudukan dan (tentunya akan menentukan pula) akses disusunan sosial masyarakat tersebut.⁴⁵
- c. Struktur masukan (*input*) politik, yaitu struktur yang memungkinkan terbentuknya atau dihasilkannya input bagi sistem politik yang dimaksud. Yang termasuk struktur input adalah serikat pekerja, kelompok-kelompok kepentingan, dan partai politik.⁴⁶

⁴⁵ Zulkarimien Nasution, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 57.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 59.

- d. Struktur *output*, yaitu struktur formal dari pemerintah. Struktur pemerintahan, khususnya birokrasi, memungkinkan pemimpin-pemimpin politik mengkomunikasikan petunjuk bagi pelaksanaan peraturan-peraturan untuk bermacam pemegang jabatan politik dengan cara yang efisien dan jelas.⁴⁷
- e. Saluran media massa adalah saluran yang penting dalam sebuah komunikasi politik. Media massa selalu mempunyai peranan tertentu dalam menyalurkan pesan, informasi, dan *political content* di tengah masyarakat, serta sangat terkait akan pembentukan opini publik.⁴⁸

6. Pembentukan Pendapat Umum

Siapakah yang dimaksud publik, dan apa itu pendapat umum? Apakah pendapat seseorang dapat dianggap sebagai pendapat umum? Beberapa pengertian tentang pendapat umum antara lain: berita atau informasi yang banyak diketahui dan dipermasalahkan oleh masyarakat; pendapat orang banyak yang dikumpulkan menjadi satu setelah dimusyawarahkan; pendapat orang banyak yang disampaikan untuk kepentingan bersama. Pendapat umum adalah kompleks preferensi yang dinyatakan sejumlah orang tertentu mengenai isu yang menyangkut kepentingan umum (Bernard Henessy).⁴⁹

Apa yang dimaksud dengan pandangan umum adalah pandangan berbagai kalangan masyarakat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama mereka dalam suatu masyarakat. tercakup di sini adalah

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 60.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 61.

⁴⁹ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik...*, hlm 156-157.

persetujuan atau tidak adanya persetujuan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Proses pembentukan pendapat berkaitan erat dengan proses sosialisasi politik, partisipasi dan perekrutan politik.

Robert Lane dan David Sears berpendapat, bahwa pendapat umum memberikan pengarahan. Ini berarti, bahwa beberapa individu akan menyetujui satu pandangan tertentu, sedangkan individu yang lain menentangnya. Memang tentang isu yang sama sering terdapat pendapat yang pro dan kontra. Di samping itu terdapat pula orang yang sama sekali tidak mempunyai pendapat tentang hal yang bersangkutan.⁵⁰

Keterlibatan seseorang dalam penentuan pendapat tidak mengadaikan bahwa orang yang bersangkutan tahu banyak tentang masalah yang bersangkutan. Anda mungkin mau mengikuti pemilihan umum yang dimaksudkan untuk menetapkan para wakil rakyat. Tetapi anda belum tentu tahu siapa yang menjadi wakil anda di Dewan Perwakilan Rakyat.⁵¹

B. Kajian Teori

Teori Komunikasi Dua Tahap dan Pengaruh Antarpribadi⁵², karena seringkali informasi mengalir dari media massa kepada pemuka pendapat, dan dari pemuka pendapat kemudian kepada orang lain yang kurang aktif dalam masyarakat. menurut teori ini media massa tidak bekerja dalam situasi sosial pasif, tetapi memiliki suatu akses ke dalam jaringan hubungan sosial

⁵⁰ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi...*, hlm. 169-170.

⁵¹ *Ibid*, hlm 171.

⁵² Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.282

yang sangat kompleks, dan bersaing dengan sumber-sumber gagasan, pengetahuan, dan kekuasaan yang lainnya.

Alasan peneliti menggunakan teori ini karena pada teori ini ada beberapa asumsi-asumsi, sebagai berikut: 1. Individu tidak terisolasi dari kehidupan sosial, tetapi merupakan anggota dari kelompok-kelompok sosial dalam berinteraksi dengan orang lain; 2. Respons dan reaksi terhadap pesan dari media tidak terjadi secara langsung dan segera, tetapi melalui perantara dan dipengaruhi oleh hubungan-hubungan sosial tersebut; 3. Ada dua proses yang berlangsung, yang pertama mengenai penerimaan dan perhatian, dan yang kedua berkaitan dengan respons dalam bentuk persetujuan atau penolakan terhadap upaya memengaruhi atau penyampaian informasi; 4. Individu tidak bersikap sama terhadap pesan media, melainkan memiliki berbagai pesan yang berbeda dalam proses komunikasi, dan khususnya, dapat dibagi di antara mereka yang secara aktif menerima dan menyebarkan gagasan dari media.

Secara garis besar, menurut teori ini media massa tidak bekerja dalam suatu situasi sosial yang pasif, tetapi memiliki suatu akses ke dalam jaringan hubungan sosial yang sangat kompleks, dan bersaing dengan sumber-sumber gagasan, pengetahuan, dan kekuasaan yang lainnya.⁵³

⁵³ *Ibid*, hlm. 283.